



djp

KPP PRATAMA  
MANOKWARI



# Laporan Kinerja Tahun 2024

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari



**JANUARI 2025**  
SEKSI PENJAMINAN KUALITAS DATA

## BAB I

### PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan demi terwujudnya aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari (KPP Pratama Manokwari) menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

t. pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam melaksanakan fungsi yang telah disebutkan di atas, KPP Pratama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II. Dalam hal ini KPP Pratama Manokwari termasuk dalam pembagian KPP Pratama Kelompok I, sehingga memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

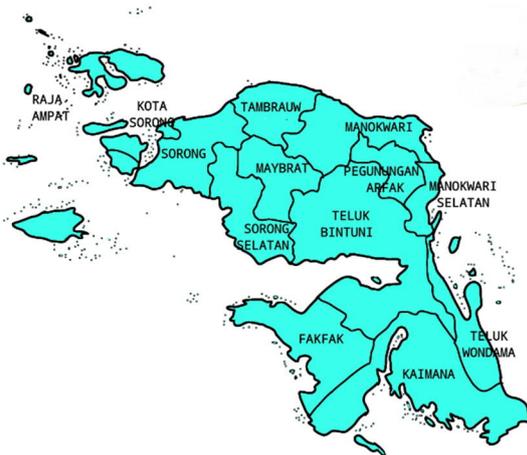
1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mewujudkan fungsi-fungsi di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari telah membuat rencana strategis. Fungsi rencana strategis ini untuk menganalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna memperhitungkan permasalahan utama (*strategic issues*) yang ada sebagai penjabaran visi Direktorat Jenderal Pajak.

## A. Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, menerapkan saat mulai beroperasinya instansi vertikal yang mengalami perubahan nomenklatur. Salah satunya yaitu perubahan Kanwil DJP Papua dan Maluku menjadi Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020, disebutkan bahwa KPP Pratama Manokwari memiliki beberapa wilayah perpajakan sebagai berikut.



KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )
MANOKWARI	3.186,28
MANOKWARI SELATAN	2.812,44
PEGUNUNGAN ARFAK	2.773,74
TELUK BINTUNI	20.840,83
TELUK WONDAMA	3.959,53

## B. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari berjumlah 74 orang dengan perincian sebagai berikut.

No.	Nama Kantor / Seksi	Jumlah Pegawai
A.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari terdiri dari :	64
1	Kepala Kantor	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	10
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	3
4	Seksi Pelayanan	10
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	5
6	Fungsional Pemeriksa	4
7	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	1
8	Seksi Pengawasan I	9
9	Seksi Pengawasan II	4
10	Seksi Pengawasan III	4
11	Seksi Pengawasan IV	4
12	Seksi Pengawasan V	4
13	Seksi Pengawasan VI	4
14	Supervisor	1
B.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuni	4

Penyebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari adalah sebagai berikut.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	8
2	S1/DIV	12
3	D.III	19
4	D.I	23
5	SMA/SMU	6
	Jumlah	68

Penyebaran pegawai berdasarkan golongan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari adalah sebagai berikut.

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV.b	1
2	IV a	2
3	III.d	4
4	III.c	5
5	III b	7
6	III.a	9
7	II.d	16
8	II.c	12
9	II.b	10
10	II.a	2
	Jumlah	68

## BAB II

### PERENCANAAN KERJA

Perencanaan Kinerja tahun 2023 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Sasaran utama pelaksanaan kegiatan KPP Pratama Manokwari adalah mencapai penerimaan pajak yang optimal. Untuk mencapai sasaran tersebut harus didukung dua aspek pokok yang harus dioptimalkan yaitu yang pertama pemenuhan layanan publik dan yang kedua yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Di antara dua aspek tersebut aspek kedua merupakan aspek yang paling vital untuk memenuhi sasaran atau target utama organisasi. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak disini maksudnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak telah melakukan pelaporan serta pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan ada.

#### A. Tujuan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan KPP Pratama Manokwari adalah merealisasikan target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp1.374 miliar.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir sebuah satuan kerja sebagai langkah awal dalam menentukan arah kerja serta koridor bagi satuan kerja dalam menjalankan kegiatan operasional.

Dalam rangka tercapainya tujuan penerimaan tersebut, maka KPP Pratama Manokwari menyusun sebuah rencana strategis, yang terdiri dari kebijakan, sasaran, dan program.

#### 1. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan keputusan formal satuan kerja mengenai hal-hal mendasar baik berupa aturan maupun program yang bersifat *problem solving* dan proaktif KPP Pratama Manokwari memiliki kebijakan meliputi program sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kerjasama antara KPP Pratama Manokwari dengan pemerintah daerah setempat.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal secara berkesinambungan.
- c. Mengawasi dan membina unit kerja dalam pembuatan dan pengembangan *mapping* dan *profiling*.
- d. Mengaktifkan dan mengawasi pemeriksaan pajak secara efektif melalui IDLP.
- e. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan langkah-langkah utama, yaitu sebagai berikut.
- f. Mengoptimalkan peranan *Account Representatif*.
- g. Meningkatkan semangat dan kualitas sumber daya manusia.
- h. Melaksanakan pembenahan administrasi tata usaha perpajakan.

## 2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi (DJP) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam Renstra DJP. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Sasaran untuk masing-masing unit Eselon III KPP Pratama adalah sasaran yang disusun sebagai hasil *cascading* Renstra Kanwil DJP, dimana ada 11 sasaran strategis yang akan dicapai.

Sasaran yang dituju dari kebijakan tersebut meliputi:

- a. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif,
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
- g. Penegakan hukum yang efektif;
- h. Data dan Informasi yang berkualitas;
- i. SDM yang kompeten;
- j. Organisasi yang berkinerja tinggi; dan
- k. Pengelolaan keuangan yang optimal.

## B. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam sasaran strategis (SS) yang

diuraikan pada Renstra DJP. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan dan tindakan yang diambil guna tercapainya sasaran yang ditetapkan :

- a. Pengawasan pertumbuhan penerimaan;
- b. Pengawasan pencapaian penerimaan;
- c. Inventaris jumlah Wajib Pajak komplain;
- d. Monitoring dan bimbingan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi;
- e. Penyuluhan Perpajakan Badan;
- f. Penyuluhan Perpajakan Orang Pribadi;
- g. Peningkatan Efektivitas manajemen penyelesaian keberatan dan banding;
- h. Pemantauan evaluasi pelaksanaan atas permohonan keberatan dan pengurangan;
- i. Penyuluhan Peraturan Perpajakan;
- j. Memasyarakatkan perpajakan;
- k. Bimbingan dan pemantauan pembuatan mapping;
- l. Perluasan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka memperoleh data perpajakan;
- m. Peningkatan kegiatan ekstensifikasi WP OP melalui pemberi kerja atau bendahara kegiatan pendataan (tempat usaha, pusat perdagangan, pertokoan dan perumahan mewah) dan pemanfaatan dan potensi lainnya;
- n. Pembinaan pencapaian target penagihan;
- o. Meningkatkan penyelesaian kasus penggelapan pajak;
- p. Analisa potensi pajak;
- q. Analisa rencana Pemeriksaan;
- r. Penelitian usul pemeriksaan;
- s. Pemantauan pelaksanaan pemeriksaan;
- t. Bimbingan pemeriksaan;
- u. Meningkatkan prosentase pemeriksaan bukti permulaan;
- v. Meningkatkan prosentase penyelesaian ke penyidikan;
- w. Meningkatkan prosentase penyidikan ke penuntutan;
- x. Meningkatkan kinerja bukti permulaan;
- y. Inventarisasi jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- z. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, BPKP dan Itjen.

### **C. Penetapan Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan yang lebih spesifik berupa kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP,

yang akan dilaksanakan oleh DJP melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja (target) tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berikut unsur-unsur penetapan kinerja.

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan poin-poin yang ingin dicapai dari unit kerja dimana memiliki peran penting dan keutamaan bagi satuan kerja.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah sebuah ukuran baik secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

3. Realisasi tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Manokwari di tahun 2024 adalah sebesar Rp1.379.587.679.697.

4. Target Tahun 2024

Target penerimaan pajak KPP Pratama Manokwari pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.374.956.467.000.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel di bawah ini menyajikan informasi capaian IKU (Indeks Kinerja Utama) pada perspektif stakeholder dan perspektif customer.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,33%	100,33
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	87,41	87,41
<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,35%	100,35
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,31%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,12%	100,12
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,45%	109,45
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,30%	120,00
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,62%	119,62
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,26%	108,26

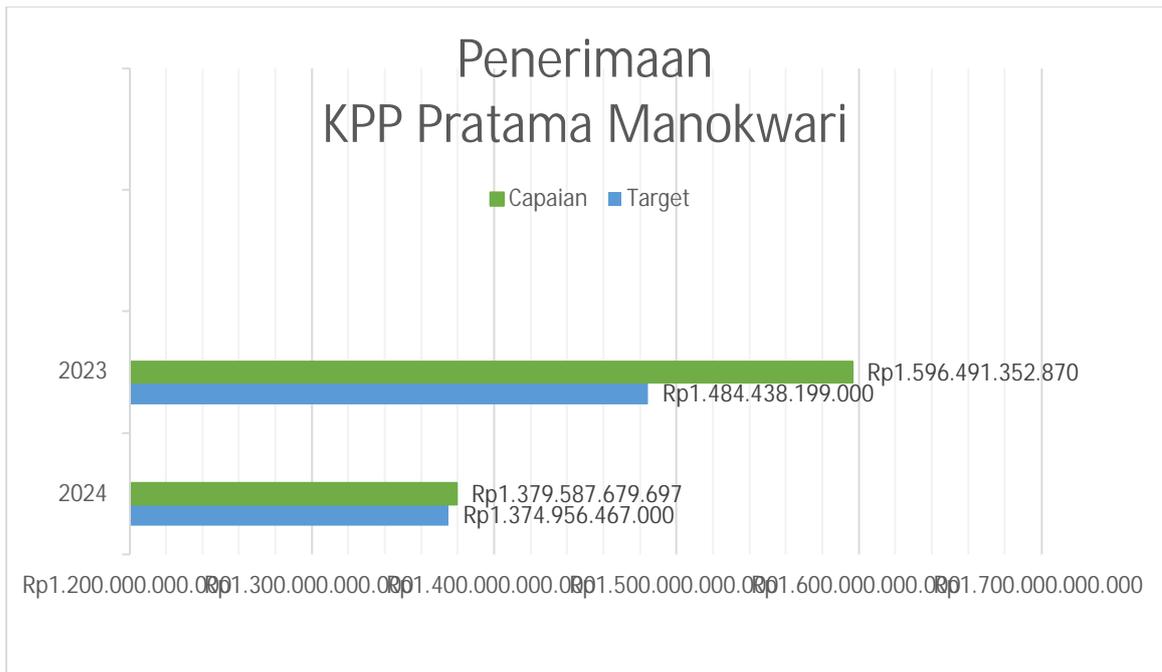
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	79,20%	105,60
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	84,05%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</i>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	116,46	116,46
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,90	115,18
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	93,85	104,28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				107,25

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Berikut paparan evaluasi dan analisis kinerja:

### 1. Persentase realisasi penerimaan pajak

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	100%	107.55%
2	2024	100%	100,33%



Angka diperoleh dari hasil perbandingan realisasi tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Manokwari Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.379.587.679.697 dengan besaran persentase 100,33%. Pada Tahun 2023 memiliki capaian realisasi 107,55% dengan nominal penerimaan sebesar Rp1.596.491.352.870. Sehingga pada tahun 2024, terjadi peningkatan pada Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun sebelumnya di KPP Pratama Manokwari sebesar 7,22%.

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	100,00	111,79
2	2024	100,00	87,41

Angka pada tabel diatas diperoleh dari hasil perbandingan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto KPP Pratama Manokwari tahun 2023 sebesar 111,79%. Sedangkan, pada Tahun 2024 KPP Pratama Manokwari hanya berhasil membuat Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto sebesar 87,41%. Dengan demikian Realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada tahun 2024 memiliki selisih sebesar 24,38%.

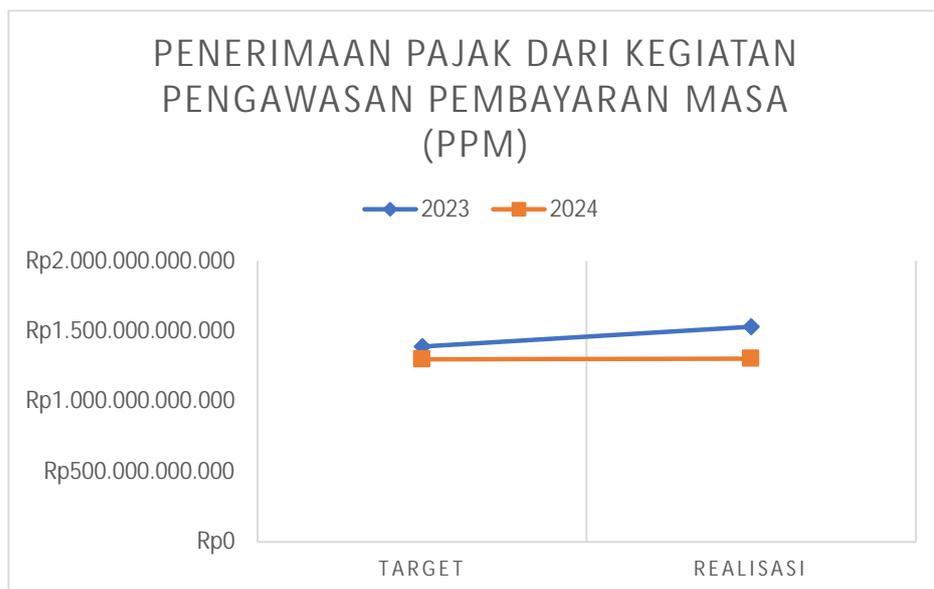
3. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	100,00	100,10
2	2024	100,00	120,31

Target Penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak(WP) Badan dan Orang Pribadi yang di tetapkan oleh Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku untuk KPP Pratama Manokwari sebanyak 48.122 SPT. Target Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dari angka mutlak, sementara realisasi IKU Triwulan IV yang dapat diraih KPP Pratama Manokwari sebanyak 52.973 SPT atau sebesar 120.31% dari target. Sehingga pada tahun 2024, terjadi peningkatan pada Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Manokwari sebesar 20,21%.

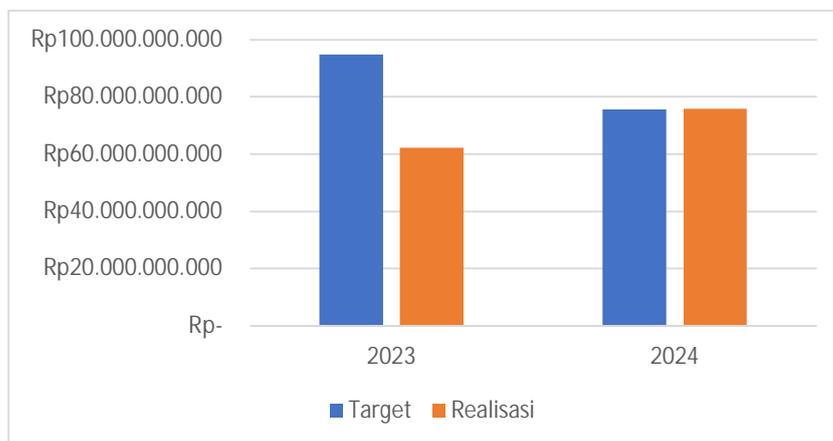
4. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	100,00	110,40
2	2024	100,00	100,35



Indeks kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), merupakan IKU yang memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan. KPP Pratama Manokwari memiliki nominal target Penerimaan PPM Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp1.299.275.037.000, dengan nominal realisasi Penerimaan PPM Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp1.303.815.818.339. Pada Tahun 2024 KPP Pratama Manokwari memiliki target PPM Triwulan IV dengan persentase sebesar 100%, sehingga realisasi PPM pada Triwulan IV sebesar 100,35%. Dengan demikian indeks capaian kinerja Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM sebesar 100,35%.

#### 5. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)



IKU Capaian Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), merupakan IKU yang memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak. Selain itu, IKU ini sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. KPP Pratama Manokwari memiliki nominal target Penerimaan PKM Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp75.681.430.000, dengan nominal realisasi Penerimaan PKM pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp75.771.861.358. Pada Tahun 2024 KPP Pratama Manokwari memiliki persentase target PKM Triwulan IV sebesar 100%. Dengan demikian, KPP Pratama Manokwari memiliki persentase realisasi PKM Triwulan IV sebesar 100,12%.

## 6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	70,00	112,29
2	2024	74,00	88,80

Target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Triwulan IV sebesar 74,00%, sedangkan Realisasi dari Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan pada Tahun 2024 sebesar 88,80%. Sehingga pada Tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 23,49%. Selain itu, KPP Pratama Manokwari berhasil meraih indeks capaian pada IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 120,00%.

## 7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	80,00	79,79
2	2024	100,00	109,45

Pada Tahun 2023, kegiatan penyuluhan dan pelayanan memiliki hasil realisasi sebesar 79,79% dan indeks capaian sebesar 98,51%. Pada Tahun 2024 IKU ini memiliki realisasi sebesar 109,45% poin dari target sebesar 100,00%, sedangkan untuk indeks capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 109,45%. Dengan demikian, terjadi kenaikan indeks capaian kinerja dari Tahun 2023 s.d. Tahun 2024 sebesar 29,56%.

## 8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	90,00	113,32
2	2024	90,00	117,30

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa merupakan IKU dari Tahun 2023. IKU tersebut merupakan penjumlahan Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Pada Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Manokwari memiliki target sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 117,30%.

9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	100,00	112,71
2	2024	100,00	119,62

Pada tahun 2024 KPP Pratama Manokwari memiliki realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebesar 119,62% dari target IKU sebesar 100,00%. Sehingga kenaikan persentase realisasi pada tahun 2024 dari tahun 2023 sebesar 6,91%.

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	100,00	118,67
2	2024	100,00	120,00

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan IKU baru pada tahun 2023. Pada Tahun 2024, KPP Pratama Manokwari memiliki realisasi sebesar 120,00% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100,00%. Sedangkan pada tahun 2023 IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki realisasi sebesar 118,67%. Dengan demikian, terjadi kenaikan realisasi tahun 2024 dari tahun 2023 sebesar 1,33%.

#### 11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu merupakan IKU baru pada tahun 2024. Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Pada tahun 2024, dengan target realisasi IKU sebesar 100,00%, KPP Pratama Manokwari telah berhasil mencapai realisasi sebesar 108,26%.

#### 12. Tingkat efektivitas pemeriksaan

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	80,00	109,30
2	2024	100,00	120,00

Pada Tahun 2023 Efektivitas Pemeriksaan memiliki target sebesar 80% dan realisasi sebesar 109,30%. Sedangkan, pada Tahun 2024 KPP Pratama Manokwari memiliki target Efektivitas Pemeriksaan sebesar 100,00%, dengan realisasi pada tahun tersebut sebesar 120,00%. Dengan demikian terdapat selisih realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 10,70%.

#### 13. Tingkat Efektivitas Penagihan

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	75,00	89,89
2	2024	75,00	79,20

IKU Efektivitas Penagihan memiliki sasaran strategis yaitu rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang

perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Pada Tahun 2024, Tingkat Efektivitas Penagihan memiliki target sebesar 75,00%, dengan realisasinya sebesar 79,20%. Dengan demikian, terjadi penurunan persentase realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan dari tahun 2023 sebesar 10,69%. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi dengan cara melaksanakan penyitaan, penerbitan SPMKP, Melakukan Blokir Rekening Penunggak pajak dan Pencegahan, serta diusahakan untuk melakukan penjualan barang sitaan.

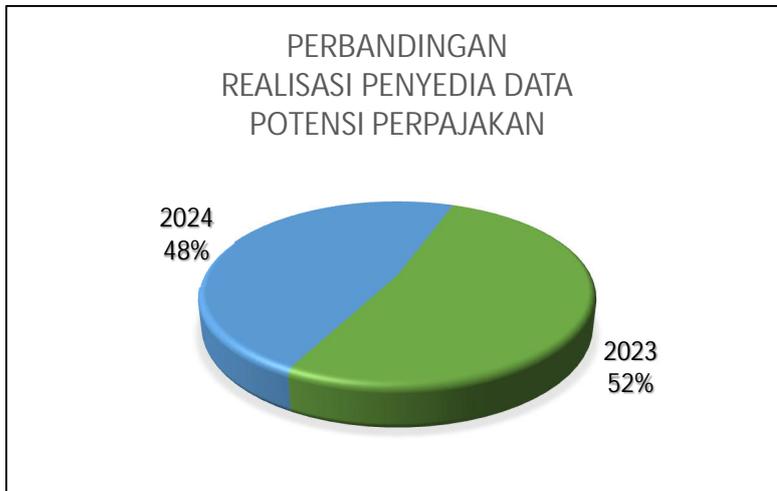
#### 14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan salah satu IKU baru pada tahun 2024. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Manokwari berhasil mencapai realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100,00% dari target capaian yang ditetapkan sebesar 100,00%.

15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan



Tabel di atas memiliki data yang diperoleh dari Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2023 dan Tahun 2024. Diagram di atas merupakan hasil perbandingan realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yang telah diselesaikan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada KPP Pratama Manokwari Tahun 2023 memiliki realisasi dengan persentase realisasi sebesar 130,96%. Pada Tahun 2024 KPP Pratama Manokwari mencapai Realisasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan persentase realisasi sebesar 120,00%. Dengan demikian, realisasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan di KPP Pratama Manokwari pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 telah melebihi target (100%).

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	55,00	68,82
2	2024	55,00	84,05

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dengan Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan.

Pada Tahun 2023 KPP Pratama Manokwari memiliki realisasi IKU sebesar 68,82%, dengan target yang ditetapkan sebesar 55,00%. Sedangkan, dengan target yang sama, pada tahun 2024 KPP Pratama Manokwari berhasil meningkatkan realisasi IKU sebesar 15,23% dengan realisasi IKU sebesar 84,05%.

#### 17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU baru selanjutnya pada tahun 2024. Dengan dua komponen IKU yaitu kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Tingkat kualitas SDM menguku kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya, Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya, dan Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), *Open Access* di KLC, *website* studiA.

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Pada tahun pertama IKU berjalan, KPP Pratama Manokwari berhasil mencapai realisasi IKU sebesar 116,46% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

## 18. Indeks Penilaian Integritas Unit

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	85,00	94,21
2	2024	85,00	97,90

Dalam Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Manokwari pada Triwulan IV Tahun 2024, memiliki target 85,00%. Sedangkan KPP Pratama Manokwari berhasil memperoleh realisasi sebesar 97,90%. Terjadi kenaikan realisasi IKU sebesar 3,69% dari realisasi tahun 2023 sebesar 94,21%.

## 19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki tujuan untuk Mengukur ifektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP.

Pada tahun 2024, dengan target sebesar 90,00%, KPP Pratama Manokwari berhasil mencapai realisasi sebesar 93,85%.

## 20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2023	100,00	97,03
2	2024	100,00	120,00

Data pada tabel di atas diperoleh dari Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Manokwari pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Pada Tahun 2023, KPP Pratama Manokwari memiliki target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 97,03%. Sedangkan target pada Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 100,00%, dengan realisasi pada tahun tersebut sebesar 120,00%. Dengan demikian, terdapat peningkatan persentase realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Manokwari sebesar 22,97%.

### C. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan DIPA KPP Pratama Manokwari TA 2024 sejumlah Rp6,658,903,000 dengan perincian sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		Rp2,298,770,000,-
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp1,262,428,000,-	
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp298,720,000,-	
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp737,622,000,-	
B. Program Dukungan Manajemen		Rp4,360,133,000,-
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp3,787,012,000,-	
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp573,121,000,-	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp6,658,903,000,-</b>

Dana anggaran tersebut dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi;
2. Pembuatan Formulir Kegiatan Pengumpulan Data;
3. Melakukan Peningkatan Kualitas Layanan dan Konsultasi Perpajakan;
4. Melakukan Peningkatan Kualitas Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan;
5. Pembuatan Dokumen Penagihan Aktif;
6. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan;
7. Pembuatan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan;
8. Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan;
9. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Perkantoran;
10. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Fasilitas Perkantoran; dan
11. Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Dengan penyerapan sampai 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	1,262,428,000	1,255,628,896	99.46%
2	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	298,720,000	295,177,355	98.81%
3	Pengawasan dan Penegakan Hukum	737,622,000	717,148,161	97.22%
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,787,012,000	3,676,959,490	97.09%
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM	573,121,000	556,967,000	97.18%
Total		6,658,903,000	6,501,880,902	97.64%

## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum kinerja KPP Pratama Manokwari selama tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hanya ada satu IKU yang harus mendapatkan perhatian lebih karena realisasi IKU tersebut tidak mencapai target realisasi yaitu IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Untuk tahun berjalan selanjutnya, KPP Pratama Manokwari harus tetap mempertahankan nilai-nilai kinerja yang sudah baik serta meningkatkan nilai yang masih termasuk kurang dari kata baik.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Manokwari untuk mencapai realisasi pertumbuhan dan pencapaian penerimaan yang optimal sebagaimana yang telah dibebankan oleh KPDJP. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah bimbingan dan pengawasan penggalian potensi, peningkatan kompetensi *Account Representative*, koordinasi pengamanan penerimaan dengan Kepala Seksi Pengawasan, pencarian data dan potensi pajak, pengawasan bendahara SKPD untuk pengamanan penerimaan dari realisasi anggaran daerah, dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan instansi lain/pihak ketiga dalam hal pencarian data Wajib Pajak untuk penggalian potensi pajak.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2024, KPP Pratama Manokwari diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Manokwari sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Manokwari, 23 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Mohamad Marulli